

HEADLINE NEWS

BUPATI H MUH ADIOS BAWA BUTON SELATAN RAIH PENGHARGAAN LPM AWARD 2026, BUKTI KUATNYA PARTISIPASI MASYARAKAT



Penghargaan diserahkan Ketua Umum DPP LPM RI Dr. Ahmad Doli Kurnia Tandjung dan diterima langsung Bupati Buton Selatan H. Muhammad Adios, S.Sos., M.B.A.

“Penghargaan ini kami persembahkan untuk seluruh masyarakat Buton Selatan. Kepercayaan ini menjadi motivasi untuk terus memperkuat program pemberdayaan dan menghadirkan pembangunan yang benar-benar dirasakan manfaatnya.”

H. Muhammad Adios, S.Sos., M.B.A.
BUPATI BUTON SELATAN



**Buton Selatan Raih
LPM Award 2026**



**Kategori: Dukungan terhadap
Pemberdayaan Masyarakat
Desa/Kelurahan Mandiri
Menuju Indonesia Maju**



**Penghargaan sebagai apresiasi atas
konsistensi memperkuat partisipasi
masyarakat melalui LPM**



**Pembangunan butuh keterlibatan
masyarakat sejak perencanaan
hingga pelaksanaan**



**Penguatan LPM jadi kunci
pembangunan inklusif, partisipatif,
dan berkelanjutan**

Laporan: Firman, Baubau Post-Durasi Times

BANDUNG, BP- Pemerintah Kabupaten Buton Selatan memperoleh LPM Award 2026 dalam kategori Dukungan terhadap Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Mandiri Menuju Indonesia Maju. Penghargaan tersebut diberikan di Gedung Merdeka, Kota Bandung, Jawa Barat, Jumat (7/8/2026), sebagai apresiasi atas konsistensi pemerintah daerah memperkuat partisipasi masyarakat melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).

Penghargaan diserahkan Ketua Umum DPP LPM RI Dr. Ahmad Doli Kurnia Tandjung dan diterima langsung Bupati Buton Selatan H. Muhammad Adios, S.Sos., M.B.A. Pemerintah daerah dinilai berhasil mendorong ter-

bentuknya ekosistem pemberdayaan yang inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan di tingkat desa dan kelurahan.

Menurut Ahmad Doli Kurnia Tandjung, posisi LPM penting karena lembaga tersebut menjadi peng-

hubung antara pemerintah dan warga. LPM di tingkat desa dan kelurahan berperan mendorong partisipasi masyarakat sekaligus menjadi mitra pemerintah agar pembangunan berjalan sesuai kebutuhan warga.

Penganugerahan itu turut dihadiri Menteri

Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia, Jenderal TNI (Purn.) Djaka Budi Utama. Ia menilai pembangunan tidak cukup hanya mengandalkan kebijakan pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan masyarakat sejak proses perencanaan hingga pelaksanaan.

“Kolaborasi pemerintah dan masyarakat merupakan kekuatan utama dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Karena itu, ruang par-

tisipasi masyarakat harus terus diperkuat melalui berbagai program pemberdayaan,” ujar Djaka Budi Utama.

Bagi Buton Selatan, penguatan peran masyarakat melalui LPM menjadi bagian dari pendekatan pembangunan yang menempatkan warga sebagai mitra pemerintah. Sinergi pemerintah kabupaten, pemerintah desa dan kelurahan, LPM, serta masyarakat men-

Lanjut ke Hal: 7

Bupati Azhari Tawarkan Potensi Maritim Buton Tengah kepada Kadin Indonesia



Laporan: Ardi

BUTON TENGAH, BP- Peluang investasi berbasis ekonomi biru di Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara,

mulai mendapat perhatian Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. Potensi budidaya lobster, ikan teri, rumput laut, serta pariwisata daerah tersebut kini disiapkan

untuk ditawarkan kepada konsorsium investor.

Rencana penja-
jukan investasi itu mengemuka setelah

Lanjut ke Hal: 7

Bupati Buton Tengah Dr. Azhari bertemu Wakil Ketua Kadin, Sarmila, di Jakarta, Rabu (4/8/2026). Pertemuan tersebut menjadi tindak lanjut pembahasan potensi kawasan transmigrasi maritim (transmarine) Buton Tengah antara Kementerian Transmigrasi dan Kadin Pusat.

Azhari mengatakan, Kadin Pusat membuka peluang membawa jejaring pengusaha untuk melihat langsung potensi investasi di Buton Tengah. Pemaparan potensi daerah kepada konsorsium investor direncanakan dilakukan setelah peringatan HUT ke-81

Bappenas Perkuat Sinergi dengan Baubau, Diproyeksikan Jadi Penggerak Ekonomi Pulau Buton lewat Infrastruktur



Laporan: Prasetyo

BAUBAU, BP- Kota Baubau didorong memperkuat perannya sebagai simpul konektivitas dan pusat pertumbuhan ekonomi di Pulau Buton melalui pengembangan infrastruktur perhubungan, perdagangan, jasa, serta pangan berbasis kelautan. Pemerintah

pusat menilai posisi geografis dan potensi maritim Baubau membuka ruang bagi daerah itu untuk memperoleh dukungan program strategis nasional.

Dorongan tersebut mengemuka dalam sharing session Koordinator Transportasi Jalan dan Transportasi

Lanjut ke Hal: 7

Bupati Buton Alvin Akawijaya Dukung Ponpes Al-Bahjah ke-87 Untuk Cetak Generasi Qurani



Laporan: La Harman

BUTON, BP- Pembangunan Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Bahjah Cabang ke-87 di Kabupaten Buton memasuki tahap awal setelah tokoh adat menyerahkan tanah

wakaf kepada Yayasan Al-Bahjah di Desa Kabawakole, Kecamatan Pasarwajo, Rabu (5/8/2026). Kehadiran pesantren tersebut diharapkan memperkuat pendidikan Islam

Lanjut ke Hal: 7

Katilombu Cup XXVI Berakhir, Bupati Buton Selatan H Muh Adios Dorong Olahraga Jadi Penggerak Ekonomi Lokal



Laporan: Firman

BUTON SELATAN, BP - Bupati Buton Selatan H. Muhammad Adios, S.Sos., M.B.A., menutup secara resmi rangkaian Katilombu

Cup XXVI Tahun 2026 di Lapangan La Ode Sungkuabuso, Kelurahan Katilombu, Kecamatan Sampolawa, Minggu (2/8/2026). Selain menjadi ajang kompetisi olahraga, ke-

giatan tersebut dinilai mampu memperkuat persatuan masyarakat sekaligus membuka ruang pengembangan ekonomi kreatif daerah.

Lanjut ke Hal: 7

Bupati H Muh Adios Bawa Buton Selatan Raih Penghargaan LPM Award 2026, Bukti Kuatnya Partisipasi Masyarakat

jadi dasar yang dinilai ikut mendorong capaian tersebut.

Bupati Muhammad Adios mengatakan penghargaan tersebut bukan semata-mata capaian pemerintah daerah, melainkan hasil kerja bersama seluruh elemen masyarakat Buton Selatan. Ia menyebut penghargaan itu sekaligus menjadi dorongan untuk memperluas program pemberdayaan dan memperkuat kolaborasi di tingkat akar rumput.

“Penghargaan ini kami persembahkan untuk seluruh masyarakat Buton Selatan. Ke-

percayaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus memperkuat program pemberdayaan masyarakat, meningkatkan kolaborasi dengan pemerintah desa dan kelurahan, serta menghadirkan pembangunan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” kata Adios.

Pemberdayaan masyarakat sendiri telah menjadi bagian penting dalam kebijakan pembangunan Indonesia sejak era Reformasi, antara lain melalui penguatan desentralisasi dan otonomi daerah. Secara global, pendekatan

an pembangunan berbasis partisipasi masyarakat juga berkembang dalam agenda pembangunan berkelanjutan Perserikatan Bangsa-Bangsa, terutama melalui penekanan pada pembangunan yang inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan. Dalam konteks tersebut, LPM Award 2026 menempatkan capaian Buton Selatan sebagai bagian dari upaya memperkuat kemitraan pemerintah dan masyarakat dari tingkat desa dan kelurahan. (*)

Bappenas Perkuat Sinergi dengan Baubau, Diproyeksikan Jadi Penggerak Ekonomi Pulau Buton lewat Infrastruktur

tasi Multimoda Bappenas RI Ahmad Zainuddin, S.Sos., M.A., bersama Wali Kota Baubau di ruang rapat lantai II Kantor Wali Kota Baubau, Kamis (6/8/2026). Pertemuan itu menjadi bagian dari upaya menyelaraskan perencanaan pusat dan daerah agar program prioritas pemerintah dapat diterapkan sesuai kebutuhan lokal.

Ahmad mengatakan Baubau memiliki posisi strategis sebagai pintu masuk utama Pulau Buton karena ditopang pelabuhan dan bandar udara. Atas pertimbangan tersebut, pemerintah pusat merencanakan penguatan infrastruktur perhubungan pada tahun depan, termasuk perluasan dan perpanjangan landasan pacu bandara.

“Tugas kami di pusat adalah bagaimana menyinergikan program antara pusat dan daerah. Kebijakan prioritas Presiden harus in-line dengan daerah. Tanpa dukungan daerah, program pusat tidak bisa berjalan,” kata Ahmad.

Menurut dia, komitmen Pemkot Baubau mempercepat pembebasan lahan bandara menjadi salah satu faktor

penting dalam membuka peluang dukungan pemerintah pusat. Kesiapan tersebut juga dinilai dapat memperkuat peluang Baubau memperoleh bantuan peningkatan infrastruktur jalan.

Arah pembangunan itu sejalan dengan perubahan pola pembangunan kota-kota dunia yang menempatkan konektivitas sebagai salah satu penggerak ekonomi. Dalam konteks Baubau, penguatan transportasi tidak hanya berkaitan dengan mobilitas orang dan barang, tetapi juga dapat menjadi pintu masuk pengembangan perdagangan, jasa, dan industri berbasis potensi lokal.

Di sektor pangan, Bappenas menilai strategi Baubau tidak dapat hanya bertumpu pada produksi beras. Dengan lahan pertanian padi sekitar 1.200 hektare, kota ini dinilai memiliki keterbatasan untuk mengandalkan pangan darat. Sebaliknya, sumber daya perikanan dan kelautan dinilai dapat menjadi basis ketahanan pangan perkotaan.

“Konsep ketahanan pangan di daerah perkotaan seperti Baubau tidak hanya bertumpu pada padi, melainkan pada pangan akuatik, yaitu komoditas perikanan dan kelautan yang potensinya sangat melimpah,” ujar Ahmad.

Pendekatan tersebut memiliki relevansi lebih luas. Bappenas, Kementerian Koordinator Bidang Pangan, dan FAO pada 2025 telah meluncurkan rencana aksi bersama untuk mengembangkan aquatic food Indonesia sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan dan gizi. FAO mencatat sektor perikanan skala kecil menyumbang hampir 90 persen produk akuatik hasil tangkapan di Indonesia.

Ahmad pun meminta Pemkot Baubau lebih aktif menangkap peluang program kementerian dan lembaga. Kesiapan dokumen perencanaan, pemetaan potensi daerah, serta kemampuan menghubungkan kebutuhan lokal dengan program pusat dinilai menjadi kunci agar dukungan, termasuk di bidang kesehatan, dapat direalisasikan lebih cepat. Ia juga menekankan agar Baubau tidak berhenti sebagai daerah perlintasan dan pasar produk dari luar, tetapi mampu mengolah potensi lokal menjadi produk bernilai tambah bagi perekonomian masyarakat. (*)

Bupati Buton Alvin Akawijaya Dukung Ponpes Al-Bahjah ke-87 Untuk Cetak Generasi Qurani

sekaligus pembinaan akhlak generasi muda di daerah itu.

Pengasuh Al-Bahjah, Ustadz Buya Yahya, hadir langsung dalam prosesi tersebut bersama tokoh adat, tokoh masyarakat, Forkopimda, jajaran Pemerintah Kabupaten Buton, serta masyarakat. Pemerintah daerah diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Buton, Awaluddin. Turut hadir Kapolres Buton AKBP Ali Rais Ndraha, S.H., S.I.K., M.M.Tr. yang mewakili Dandim 1413/Buton dan jajaran Kementerian Agama Kabupaten Buton. Rangkaian kegiatan diawali penyambutan Buya Yahya dengan Tari Mangaru dan pengalungan bunga. Setelah itu, rombongan meninjau lokasi tanah wakaf sebelum dilanjutkan dengan penyerahan tanah adat oleh tokoh adat kepada Yayasan Al-Bahjah se-

bagai bagian dari persiapan pembangunan pesantren.

Mewakili Bupati Buton, Awaluddin menyatakan pemerintahan daerah memberikan dukungan terhadap adap pembangunan lembaga pendidikan tersebut. Pemkab berharap Al-Bahjah dapat menjadi pusat pendidikan yang membentuk generasi Qurani, beriman, berakhlak mulia, sekaligus memiliki kemampuan untuk beradaptasi dan bersaing di berbagai bidang.

“Pemerintah Kabupaten Buton menyambut baik pembangunan Pondok Pesantren Al-Bahjah di daerah ini. Kami berharap pembangunan pesantren ini mendapat dukungan penuh dari seluruh elemen masyarakat,” ujar Awaluddin saat membacakan sambutan Bupati Buton.

Buya Yahya dalam tausiyahnya kemudian

mengajak masyarakat tidak melihat pembangunan pesantren semata-mata sebagai proyek fisik. Menurut dia, keterlibatan umat dalam menyediakan ilmu, tenaga, harta, gagasan, hingga doa merupakan bagian dari amal jariyah yang manfaatnya dapat terus mengalir selama ilmu dan kebaikan yang lahir dari pesantren diamalkan.

“Jangan pernah malu berjuang sesuai kemampuan. Bisa dengan ilmu, harta, tenaga, ide, bahkan doa,” kata Buya Yahya. Ia menegaskan, semangat swadaya umat menjadi bagian penting dalam pembangunan Al-Bahjah agar masyarakat memiliki rasa memiliki terhadap keberadaan pesantren.

Secara historis, pesantren telah menjadi bagian penting dari perjalanan pendidikan Indonesia. Kementerian Agama mencatat pesantren telah berkembang

jauh sebelum Indonesia merdeka dan memiliki peran dalam pendidikan, dakwah, serta pemberdayaan masyarakat. Negara kemudian memberikan pengakuan yang lebih kuat melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, yang menegaskan tiga fungsi utama pesantren tersebut.

Kehadiran Al-Bahjah Cabang ke-87 di Buton karena itu diharapkan tidak berhenti sebagai penambahan lembaga pendidikan Islam, tetapi berkembang menjadi pusat pembinaan generasi muda, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. Dengan dukungan pemerintah, tokoh adat, masyarakat, serta Yayasan Al-Bahjah, pembangunan pesantren tersebut diharapkan segera terwujud dan memberikan manfaat jangka panjang bagi Kabupaten Buton. (*)

Bupati Azhari Tawarkan Potensi Maritim Buton Tengah kepada Kadin Indonesia

Kemerdekaan RI.

“Kadin Pusat tertarik melihat potensi budidaya lobster, ikan teri, rumput laut, dan pariwisata di Buton Tengah,” kata Azhari.

Menurut dia, kunjungan calon investor akan diarahkan untuk melihat peluang pengembangan komoditas perikanan sekaligus potensi pariwisata. Dalam waktu dekat, investor dari sektor perhotelan dan rumput laut juga dijadwalkan mengirim tim ke Buton Tengah.

Langkah tersebut sejalan dengan upaya pemerintah daerah membuka sumber pertumbuhan ekonomi baru di luar sektor mineral. Azhari menilai pengembangan ekonomi biru dapat menjadi instrumen diversifikasi ekonomi Sulawesi Tenggara, terutama dengan mengoptimalkan sumber

daya pesisir dan laut secara berkelanjutan.

“Kami terus membuka ruang kolaborasi dengan dunia usaha untuk memperkuat ekonomi biru dan pengembangan pariwisata,” ujar Azhari.

Secara global, gagasan ekonomi biru semakin mendapat perhatian dalam agenda pembangunan berkelanjutan setelah Konferensi Rio+20 di Brasil pada 2012. Perserikatan Bangsa-Bangsa mencatat konferensi tersebut memperkuat perhatian dunia terhadap laut dan sumber daya kelautan sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan.

Di Indonesia, pengembangan konsep ekonomi biru juga telah masuk ke kebijakan sektor kelautan. Kementerian Kelautan dan Perikanan membentuk tim pengem-

banan dan pelaksanaan konsep ekonomi biru melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 41 Tahun 2013. Pada 2026, KKP kembali memperkuat agenda ekonomi biru melalui kerja sama dengan UNDP, antara lain mencakup hilirisasi industri rumput laut dan pembiayaan inovatif.

Pemkab Buton Tengah menyatakan kesiapan menyambut peluang tersebut dengan membangun kemitraan yang memberi nilai tambah bagi masyarakat. Bagi daerah, masuknya investasi di sektor perikanan dan pariwisata diharapkan tidak sekadar meningkatkan aktivitas ekonomi, tetapi juga memperluas lapangan kerja dan memperkuat posisi Buton Tengah sebagai salah satu kawasan potensial ekonomi biru di Sulawesi Tenggara. (*)

Katilombu Cup XXVI Berakhir, Bupati Buton Selatan H Muh Adios Dorong Olahraga Jadi Penggerak Ekonomi Lokal

Penutupan turnamen yang dirangkaikan dengan malam ramah tamah itu berlangsung meriah dengan menampilkan berbagai ekspresi seni dan budaya lokal. Tari Badenda serta kreasi pemuda Kelurahan Katilombu menjadi bagian dari rangkaian acara yang menggemakan keterlibatan generasi muda dalam menjaga budaya daerah.

Bupati Muhammad Adios dalam kesempatan tersebut menyampaikan apresiasi kepada panitia, pemerintah kelurahan, peserta, serta seluruh masyarakat yang telah mendukung keberhasilan pelaksanaan Katilombu Cup XXVI. Menurutnya, keberhasilan kegiatan olahraga tidak hanya diukur dari hasil pertandingan, tetapi juga dari nilai kebersamaan yang tumbuh selama pelaksanaan kegiatan.

“Melalui kegiatan seperti ini, kita tidak hanya mencari prestasi, tetapi juga memperkuat kebersamaan, persaudaraan, dan semangat membangun daerah,” kata Muhammad Adios.

Kegiatan itu turut dihadiri Ketua TP PKK Kabupaten Buton Selatan Ny. Hj. Siti Norma Adios, Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Selatan, anggota DPRD daerah pemilihan Sampola-

wa, perwakilan Bank Sultra, staf ahli bupati, para asisten Setda, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), Ketua Dharma Wanita Persatuan Busel, Camat Sampolawa, Lurah Katilombu, Ketua GEKRAF Buton Selatan, unsur TNI-Polri, tokoh adat, tokoh pemuda, serta masyarakat.

Selain pertandingan olahraga, Katilombu Cup XXVI juga menghadirkan aktivitas ekonomi masyarakat melalui stan kuliner lokal. Ketua TP PKK Kabupaten Buton Selatan meninjau sejumlah stan yang menampilkan produk olahan khas daerah hasil kreativitas anggota PKK Kelurahan Katilombu. Kehadiran stan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal.

Bupati berharap Katilombu Cup dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan sebagai agenda tahunan yang mampu melahirkan atlet-atlet potensial sekaligus menjadi ruang promosi produk UMKM dan ekonomi kreatif masyarakat. Ia menilai kolaborasi antara olahraga, budaya, dan sektor ekonomi dapat menjadi salah satu strategi mempercepat pembangunan daerah.

“Olahraga harus menjadi ruang pembi-

naan generasi muda, memperkuat karakter, sekaligus memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat,” ujar Bupati.

Secara historis, olahraga di berbagai negara telah berkembang menjadi instrumen pembangunan sosial. Sejak penyelenggaraan Olimpiade modern pertama di Athena, Yunani, pada 1896, olahraga tidak hanya dipandang sebagai kompetisi, tetapi juga sebagai sarana memperlerat hubungan antarmanusia dan membangun identitas masyarakat. Di Indonesia, semangat serupa tercermin sejak penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) pertama di Surakarta pada 1948 yang menjadi simbol persatuan bangsa melalui olahraga.

Penutupan Katilombu Cup XXVI Tahun 2026 kemudian ditandai dengan malam ramah tamah sebagai akhir seluruh rangkaian kegiatan. Pemerintah Kabupaten Buton Selatan berharap momentum tersebut dapat terus menjadi wadah positif dalam memperkuat solidaritas masyarakat, meningkatkan prestasi olahraga, serta mengembangkan potensi ekonomi kreatif di tingkat lokal. (*)

Prasetyo Hadi Bantah Prabowo Terbitkan Surpres Pergantian Kapolri Listyo



Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menepis isu terbitnya surat presiden pergantian Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Laporan: Alwan

JAKARTA, BP-Istana Kepresidenan membantah kabar mengenai terbitnya surat presiden (surpres) untuk mengganti Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Hingga Jumat (7/8), Presiden Prabowo Subianto disebut belum menerbitkan ataupun mengirimkan surpres tersebut kepada DPR.

Penegasan itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta. Menurut Prasetyo, isu pergantian Kapolri yang beredar di ruang publik tidak disertai dengan adanya surpres yang telah diterbitkan

Presiden.

“Berkenaan dengan masalah surpres pergantian Kapolri, dapat kami sampaikan bahwa sampai hari ini tidak ada atau belum ada surpres pergantian Kapolri,” kata Prasetyo, Jumat (7/8).

Selain soal Kapolri, pemerintah juga belum mengirimkan surpres mengenai calon definitif Gubernur Bank Indonesia sebagai pengganti Perry Warjiyo kepada DPR. Prasetyo mengatakan proses penentuan calon tersebut masih berlangsung karena Presiden masih berdiskusi, menerima pendapat, dan meminta masukan dari berbagai pihak.

“Karena masih sedang proses, jadi Ba-

pak Presiden dalam waktu-waktu terakhir ini banyak berdiskusi, banyak menerima pendapat, banyak meminta masukan,” ujarnya. Menurut dia, pengajuan calon Gubernur BI akan dilakukan kepada DPR sesuai mekanisme yang telah diatur ketika proses tersebut selesai.

Prasetyo sekaligus merespons isu reshuffle Kabinet Merah Putih. Ia mengatakan hingga saat ini belum terdapat rencana perombakan kabinet. Apabila nantinya dilakukan perubahan, pemerintah disebut akan lebih dahulu mengisi sejumlah posisi yang kosong, termasuk Wakil Menteri Pertanian dan Wakil

Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan.

Isu pergantian Kapolri sebelumnya mencuat dan mendapat perhatian publik setelah dikaitkan dengan kemungkinan diterbitkannya surpres oleh Presiden. Kapolri Listyo Sigit kemudian menegaskan bahwa keputusan mengenai jabatan tersebut berada dalam kewenangan Presiden.

“Itu prerogatif Presiden. Jadi, buat kita prajurit apapun dilaksanakan. Kita menunggu saja,” kata Listyo saat ditanya mengenai isu surpres pergantian Kapolri pada Rabu (5/8).

Secara historis, mekanisme pengangkatan Kapolri di Indonesia menempatkan Presiden sebagai pihak yang mengusulkan calon Kapolri kepada DPR untuk memperoleh persetujuan. Ketentuan tersebut antara lain diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Mekanisme serupa mengenai pengangkatan pimpinan kepolisian dengan keterlibatan otoritas politik juga dikenal di sejumlah negara, meski tata caranya berbeda sesuai sistem ketatanegaraan masing-masing. (*)

Prabowo Ungkap Bahlil Punya Cara Khusus Bikin Jokowi Tertawa di Acara Buku



Presiden RI Prabowo Subianto berkelakar bahwa Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebagai orang yang pandai karena bisa membuat Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) tertawa.

Laporan: Radit

JAKARTA, BP-Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan kesannya terhadap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. Selain menilai Bahlil memiliki jiwa kepemimpinan, Prabowo melontarkan gurauan bahwa Ketua Umum Partai Golkar itu memiliki kemampuan membuat Presiden ke-7 RI Joko Widodo tertawa.

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri peluncuran buku 10 Karya Nyata untuk Negeri: Setengah Abad Bahlil Lahadalia di Jakarta, Jumat (7/8). Dalam acara itu, Prabowo juga mengungkapkan bahwa hubungan dengan Bahlil tidak sekadar sebagai presiden dan menteri, tetapi juga sebagai mitra politik.

Prabowo mengatakan dirinya sebenarnya belum terlalu lama mengenal Bahlil. Namun, sejak pertemuan awal, ia mengaku sudah menangkap adanya kualitas kepemimpinan dalam diri Bahlil. Menurut dia, karakter dan kemampuan seseorang dapat terbaca dari percakapan singkat, respons, serta cara menyampaikan gagasan.

“Jadi kita sudah bisa lihat. Kita bisa menangkap apakah

itu dikatakan getaran, apa dikatakan insting, mungkin bahasa Inggrisnya vibes atau chemistry,” ujar Prabowo.

Dalam suasana santai, Prabowo kemudian menyinggung kemampuan Bahlil berkomunikasi dengan Jokowi. Ia menyebut Jokowi yang berasal dari Solo, Jawa Tengah, dikenal memiliki karakter kalem dan tidak mudah tertawa. Karena itu, Prabowo mengaku heran Bahlil dapat membuat Jokowi tertawa.

“Tapi saya perhatikan ini beliau orang Indonesia Timur tapi pandai, ya kan. Kalau aku lihat beliau, bisa bikin Pak Jokowi ketawa,” kata Prabowo.

Prabowo juga menambahkan karakter masyarakat Solo dengan Banyumas, daerah yang memiliki kaitan dengan garis keturunannya. Ia bergurau bahwa masyarakat Banyumas cenderung berbicara lebih keras sehingga terkadang disalahartikan sebagai pertengkaran. “Kalau Banyumas itu Bataknya orang Jawa. Kita ngobrol dianggap kita bertengkar gitu,” ujarnya.

Kemampuan Bahlil meyakinkan orang lain juga dirasakan Prabowo ketika dirinya sempat menyatakan tidak akan menghadiri acara tersebut. Menurut Prabowo, Bahlil tidak memak-

sanya, tetapi justru menyampaikan bahwa kehadiran secara fisik bukan persoalan utama. Sikap tersebut justru membuat Prabowo akhirnya datang ke lokasi.

Secara historis, Bahlil merupakan figur yang perjalanan politiknya berkembang dari organisasi kepemudaan dan dunia usaha hingga masuk pemerintahan. Ia dipercaya menjadi Menteri Investasi/Kepala BKPM pada 2021 sebelum kemudian ditugaskan sebagai Menteri ESDM pada 2024. Dalam politik kepartaian, Bahlil terpilih sebagai Ketua Umum Partai Golkar pada Agustus 2024. Posisi tersebut membuatnya menjadi salah satu figur penting dalam pemerintahan dan koalisi politik pendukung Prabowo.

Dalam sejarah pemerintahan Indonesia, hubungan antara presiden dan ketua umum partai pendukung memang kerap menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas politik pemerintahan. Di tingkat internasional, pola serupa juga lazim ditemukan dalam sistem pemerintahan yang mengandalkan dukungan partai atau koalisi, terutama ketika pemerintah harus membangun komunikasi politik lintas kelompok. Bagi Prabowo, kemampuan membaca karakter dan membangun komunikasi menjadi salah satu kualitas yang membuat Bahlil dinilai memiliki posisi strategis. (*)

Wacana Pilkada Tanpa Wakil Menguat, Ganjar Desak DPR Bentuk Pansus

Laporan: Alwan

JAKARTA, BP-Wacana menghapus posisi wakil kepala daerah dalam pemilihan kepala daerah mendorong politikus PDI Perjuangan Ganjar Pranowo meminta DPR membentuk panitia khusus (pansus) untuk membahas revisi regulasi pemilu secara menyeluruh. Ganjar menilai perubahan sistem pemilu dan pilkada tidak semestinya dibahas secara parsial karena menyangkut banyak aspek demokrasi dan keterwakilan politik.

Ganjar menyebut sedikitnya terdapat tujuh isu yang perlu dibahas dalam revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan regulasi terkait pilkada. Isu tersebut mencakup desain pemilu lokal dan nasional, keserentakan, sistem proporsional, ambang batas pencalonan presiden, hingga sistem legislatif yang meliputi ambang batas parlemen, daerah pemilihan, dan konversi kursi.

Persoalan pilkada



Politikus PDIP Ganjar Pranowo dorong DPR bentuk pansus untuk bahas revisi UU Pemilu.

juga menjadi bagian penting dalam agenda tersebut. Menurut Ganjar, pembahasan perlu mencakup ambang batas pencalonan dan penjadwalan pilkada. Selain itu, DPR perlu memperkuat kelembagaan penyelenggara pemilu serta membahas integritas pemilu, termasuk persoalan politik uang dan netralitas aparat.

“Begitu banyaknya isu, maka perlu segera dilakukan pembahasan. Sehingga pembahasan tidak parsial,” kata Ganjar saat dihubungi, Kamis (6/8).

Isu lain yang diso-

roti adalah asas representatif dalam sistem politik, termasuk keterwakilan perempuan, representasi daerah dan kelompok rentan, serta akses politik bagi penyandang disabilitas. Atas berbagai persoalan tersebut, Ganjar menilai pembentukan pansus dapat menjadi forum untuk menyatukan seluruh usulan dalam satu pembahasan yang komprehensif.

“Sebaiknya segera dibentuk Pansus, agar pembahasan semua isu dan usulan dibahas secara komprehensif,” ujar Ganjar.

Wacana tersebut

muncul ketika anggota Komisi II DPR dari PKB, Muhammad Khozin, mengusulkan perubahan model pemilihan kepala daerah dengan menghapus posisi wakil kepala daerah dalam pemilihan. Ia mengusulkan agar masyarakat cukup memilih kepala daerah, sedangkan wakilnya ditunjuk oleh kepala daerah terpilih. “Kita pilih saja kepala daerah tanpa wakil. Wakil kepala daerah cukup ditunjuk oleh kepala daerah,” kata Khozin.

Secara kelembagaan, UU Pilkada

berada dalam regulasi yang terpisah dari UU Pemilu. Sementara itu, dari kedua regulasi tersebut, UU Pemilu saat ini masuk dalam Prolegnas Prioritas 2026. Adapun UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ditetapkan pada 15 Agustus 2017 dan mulai berlaku 16 Agustus 2017.

Perubahan atur-

an pemilu bukan hal baru dalam sejarah demokrasi Indonesia. Pemilu 2004 menjadi tonggak ketika presiden dan wakil presiden mulai dipilih langsung oleh rakyat setelah perubahan UUD 1945. Lima belas tahun kemudian, Pemilu 2019 untuk pertama kalinya digelar serentak dengan pemilihan

presiden, DPR, DPD, serta DPRD dalam satu hari. Secara internasional, desain jabatan kepala daerah dan wakilnya juga beragam; di Amerika Serikat, misalnya, gubernur dan lieutenant governor dipilih sebagai satu tiket di sejumlah negara bagian, sementara di 17 negara bagian keduanya dipilih secara terpisah. (*)

Ada 212 Titik Blankspot Hambat Akses Informasi, Kemenko Polkam Dorong Sultra Perkuat PPID dan Akses Informasi Masyarakat



SULTRA, BP- Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) didorong memperkuat tata kelola komunikasi dan informasi publik setelah hasil evaluasi 2025 menunjukkan capaian keterbukaan informasi daerah tersebut masih berada di bawah rata-rata nasional. Persoalan kapasitas pengelola informasi hingga keberadaan 212 titik blankspot menjadi sejumlah tantangan yang dibahas dalam kunjungan kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) di Kendari, Rabu (5/8/2026).

Kunjungan tersebut dilakukan Deputy V Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kemenko Polkam ke Dinas Komunikasi dan Informatika serta Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tenggara. Pertemuan berlangsung di Kantor Dinas Kominfo Sultra dan dihadiri jajaran pemerintah daerah terkait.

Asisten Deputy Koordinasi Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Kemenko Polkam, Agung Pratistho, memimpin kunjungan tersebut. Ia diterima Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara, Andi Syahrir, bersama jajarannya.

Persoalan akses informasi menjadi salah satu perhatian utama dalam pertemuan itu. Dinas Kominfo Sultra mengungkapkan masih terdapat 212 titik blankspot yang berdampak terhadap kemampuan masyarakat di sejumlah wilayah untuk memperoleh informasi secara cepat dan memadai.

Kondisi geografis dan keterbatasan infrastruktur komunikasi membuat pemerataan akses informasi masih menjadi pekerjaan rumah. Di sisi lain, perkembangan teknologi digital menuntut pemerintah menyediakan informasi yang semakin cepat, terbuka, mu-

dah diakses, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selain persoalan infrastruktur, kapasitas kelembagaan pengelola informasi juga menjadi perhatian. Kapasitas PPID di lingkungan pemerintah daerah dinilai belum merata, sementara sumber daya manusia yang menangani pengelolaan informasi publik masih terbatas.

Kanal komunikasi digital pemerintah daerah juga dinilai belum sepenuhnya optimal. Karena itu, penguatan website dan media sosial pemerintah menjadi bagian dari strategi yang perlu dilakukan agar penyampaian informasi publik dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas.

Agung mengatakan keterbukaan informasi memiliki posisi strategis dalam membangun hubungan pemerintah dengan masyarakat. Menurut dia, akses terhadap informasi bukan hanya persoalan administratif, melainkan berkaitan dengan partisipasi publik dan kepercayaan terhadap pemerintah.

“Keterbukaan informasi publik tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kewajiban badan publik dalam menyediakan informasi, tetapi juga menjadi instrumen untuk memperkuat partisipasi masyarakat dan membangun kepercayaan publik,” ujar Agung.

Ia menambahkan, penguatan kelembagaan PPID, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah diperlukan untuk membangun layanan informasi publik yang lebih efektif dan responsif.

Secara historis, keterbukaan informasi publik di Indonesia memperoleh landasan hukum yang kuat setelah pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Infor-

masi Publik. Regulasi tersebut menegaskan hak masyarakat memperoleh informasi dari badan publik dan menjadi salah satu tonggak penting dalam perkembangan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan.

Prinsip tersebut juga memiliki akar dalam perkembangan hukum internasional. Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang diadopsi Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 1948 telah menempatkan kebebasan mencari, menerima, dan menyampaikan informasi sebagai bagian dari kebebasan berpendapat. Perkembangan itu kemudian menjadi rujukan penting bagi berbagai negara dalam membangun sistem keterbukaan informasi.

Di Indonesia, kebutuhan terhadap keterbukaan semakin kuat seiring berkembangnya pemerintahan digital dan meningkatnya penggunaan media daring. Masyarakat tidak lagi hanya mengandalkan saluran informasi konvensional, tetapi juga menuntut pemerintah menyediakan informasi melalui platform digital secara cepat dan mudah dipahami.

Hasil pengukuran Indeks Komunikasi Pembangunan dan Informasi Publik (KPIP) 2025 yang dibahas dalam kunjungan tersebut juga menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas SDM, koordinasi antarperangkat daerah, dan optimalisasi kanal komunikasi pemerintah.

Kepala Dinas Kominfo Sultra, Andi Syahrir, mengatakan pemerintah provinsi terus melakukan pembenahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi. Upaya itu dilakukan melalui penguatan kapasitas PPID, optimalisasi sistem informasi, serta peningkatan koordinasi dengan perangkat daerah.

“Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara terus memperkuat tata kelola informasi publik

melalui peningkatan kapasitas PPID, optimalisasi sistem informasi, serta koordinasi dengan perangkat daerah,” kata Andi.

Menurut dia, pembenahan tersebut masih membutuhkan dukungan bersama karena setiap perangkat daerah perlu memiliki sumber daya dan mekanisme yang jelas dalam mengelola informasi publik. Dengan demikian, pelayanan informasi tidak berjalan secara parsial, tetapi menjadi bagian dari sistem pemerintahan daerah.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara juga memperkuat peran PPID Utama dan PPID Pelaksana. Langkah tersebut disertai peningkatan kapasitas sumber daya manusia, optimalisasi website dan media sosial pemerintah, serta monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi publik.

Kunjungan Kemenko Polkam sekaligus diarahkan untuk memetakan kondisi aktual penyelenggaraan komunikasi pembangunan dan pelayanan informasi publik di Sultra. Hasil pemetaan tersebut akan digunakan sebagai bahan penyusunan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat tata kelola komunikasi dan informasi publik.

Penguatan itu tidak hanya membutuhkan keterlibatan pemerintah daerah. Kemenko Polkam juga mendorong sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, PPID, badan publik, media, dan masyarakat agar ekosistem informasi publik berjalan secara transparan dan adaptif.

Dengan pembenahan kelembagaan, peningkatan kualitas SDM, penguatan kanal digital, serta penanganan persoalan infrastruktur, pelayanan informasi publik di Sultra diharapkan semakin mudah dijangkau masyarakat. Tantangan 212 titik blankspot sekaligus menjadi bagian penting dari agenda pemerataan akses informasi di daerah.

Pada akhirnya, peningkatan keterbukaan informasi tidak hanya diukur dari banyaknya informasi yang tersedia, tetapi juga dari sejauh mana informasi tersebut dapat diakses, dipahami, dan dimanfaatkan masyarakat. Upaya tersebut diharapkan memperkuat kualitas pelayanan publik sekaligus membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. (Mashuri)

Famtrip Overland Dibuka, Gubernur Sultra ASR Perluas Promosi Wisata Bombana hingga Koltim



Laporan: Lisna

SULTRA, BP- Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mulai memperluas strategi promosi pariwisata dengan menghubungkan potensi destinasi di sejumlah daerah melalui jalur perjalanan darat. Langkah itu ditandai dengan pelepasan peserta Famtrip Overland yang menyusuri Bombana, Kolaka, dan Kolaka Timur selama tiga hari, 7-9 Agustus 2026.

Gubernur Sulawesi Tenggara Mayjen TNI (Purn.) Andi Sumangerukka melepas langsung rombongan tersebut di Pelataran Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, Jumat (7/8/2026). Kegiatan itu melibatkan komunitas pariwisata, influencer, content creator, media, serta perwakilan pemerintah daerah.

Famtrip tersebut dirancang bukan sekadar sebagai perjalanan wisata, tetapi juga sebagai sarana memperkenalkan potensi ekonomi daerah secara langsung. Peserta dijadwalkan mengunjungi sejumlah destinasi, menikmati kekayaan budaya dan kuliner lokal, serta melihat aktivitas ekonomi kreatif dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di tiga kabupaten.

Pemerintah provinsi menilai pola promosi semacam itu penting untuk memperluas jangkauan informasi mengenai destinasi yang selama ini belum banyak dikenal. Materi perjalanan yang dihasilkan peserta diharapkan dapat disebarluaskan melalui media massa dan berbagai platform digital.

“Melalui Famtrip ini, kita ingin memperkenalkan berbagai destinasi wisata unggulan Sulawesi Tenggara kepada masyarakat Indonesia bahkan dunia,” kata Andi Sumangerukka.

Menurut gubernur, Bombana, Kolaka, dan Kolaka Timur memiliki potensi yang dapat dikembangkan sebagai bagian dari jaringan destinasi pariwisata Sulawesi Tenggara. Promosi yang lebih luas diperlukan agar kekayaan tersebut tidak hanya dikenal masyarakat lokal, tetapi juga wisatawan dari daerah lain dan mancanegara.

Di sisi lain, pemerintah daerah juga diarahkan untuk melihat pariwisata sebagai bagian dari penggerak ekonomi. Aktivitas wisata dapat menciptakan permintaan terhadap jasa transportasi, akomodasi, kuliner, kerajinan, produk UMKM, hingga berbagai layanan pendukung lainnya.

Pengembangan pariwisata sebagai instrumen ekonomi sebenarnya bukan kebijakan baru dalam pembangunan nasional. Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata yang ditetapkan pada 16 Januari 2009. Regulasi tersebut menggantikan UU Nomor 9 Tahun 1990

dan menempatkan kepariwisataan dalam kerangka pembangunan yang melibatkan masyarakat, dunia usaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.

Dalam perkembangannya, skala industri pariwisata Indonesia juga semakin besar. Data Sistem Informasi Kepariwisata Nasional mencatat pada 2024 terdapat lebih dari 1,02 miliar perjalanan wisatawan domestik dan sekitar 13,9 juta kunjungan wisatawan mancanegara. Data yang sama mencatat 25,01 juta tenaga kerja pariwisata, menunjukkan besarnya keterkaitan sektor ini dengan aktivitas ekonomi dan lapangan pekerjaan.

Sulawesi Tenggara sendiri terus membangun basis data dan pemetaan destinasi sebagai bagian dari pengembangan pariwisata daerah. Data Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menunjukkan adanya pemetaan destinasi pariwisata provinsi berdasarkan berbagai kategori, termasuk destinasi alam, budaya, serta pengembangan sumber daya manusia ekonomi kreatif.

Dengan latar tersebut, Famtrip Overland Bombana-Kolaka-Kolaka Timur diarahkan untuk memperkuat konektivitas jalur wisata antarkabupaten. Pemerintah provinsi berharap perjalanan tersebut dapat membentuk rangkaian destinasi yang saling terhubung sehingga wisatawan memiliki lebih banyak pilihan dalam satu perjalanan.

Andi Sumangerukka juga mengingatkan peserta agar tidak hanya mengejar publikasi destinasi. Mereka diminta menjaga kelestarian lingkungan, menghormati adat istiadat, serta menghargai budaya masyarakat di setiap lokasi yang dikunjungi.

“Peserta harus menjadi duta promosi yang mampu menyebarluaskan citra positif Sulawesi Tenggara kepada masyarakat luas,” ujar Andi Sumangerukka.

Pemprov Sultra juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Bombana, Kolaka, dan Kolaka Timur, panitia pelaksana, komunitas pariwisata, media, serta seluruh pihak yang mendukung kegiatan tersebut.

Gubernur berharap perjalanan selama tiga hari itu menghasilkan pengalaman sekaligus materi promosi yang mampu meningkatkan eksposur destinasi di Sulawesi Tenggara. Pada saat yang sama, kegiatan tersebut diharapkan memberi ruang lebih besar bagi pelaku UMKM dan ekonomi kreatif untuk memperoleh manfaat langsung dari pertumbuhan kunjungan wisata.

“Selamat berpetualang menyusuri tiga kabupaten. Semoga perjalanan ini menghadirkan pengalaman berkesan sekaligus menjadi sarana memperkenalkan pesona Sulawesi Tenggara kepada masyarakat yang lebih luas,” kata gubernur saat melepas peserta Famtrip Overland. (*)

Ombudsman Mulai Penilaian Layanan Publik 2026, Buton Siapkan Perbaikan Mutu



Pewarta: La Harman

KENDARI, BP- Pemerintah Kabupaten Buton menjadi salah satu daerah yang mengikuti Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2026 oleh Ombudsman Republik Indonesia. Evaluasi tersebut diarahkan untuk memastikan standar pelayanan dipenuhi sekaligus mencegah maladministrasi yang dapat merugikan masyarakat.

Komitmen Pemerintah Kabupaten Buton dalam mengikuti proses evaluasi itu ditunjukkan dengan kehadiran Bupati Buton Alvin Akawijaya Putra, S.H., pada Entry Meeting Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik 2026 di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, Kendari, Selasa (4/8/2026).

Anggota Ombudsman RI Syarida Rahahan mengatakan, penilaian kepatuhan merupakan agenda tahunan yang hasil akhirnya dituangkan dalam Opini Ombudsman. Penilaian tersebut mengukur tingkat kepatuhan penyelenggara pelayanan publik terhadap standar layanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Penilaian kepatuhan ini kami laksanakan setiap tahun sebagai upaya membangun budaya pelayanan publik yang semakin baik,” ujar

Syarida Rahahan. Menurut dia, hasil penilaian tidak semata-mata dimaksudkan untuk memberikan nilai kepada instansi, tetapi juga menjadi instrumen perbaikan kualitas pelayanan.

Rangkaian penilaian di Sulawesi Tenggara dijadwalkan berlangsung mulai Agustus hingga November 2026. Selain pemerintah daerah, objek penilaian mencakup jajaran kepolisian, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, serta Kantor Wilayah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional beserta satuan kerja terkait.

Syarida menegaskan, pencegahan maladministrasi menjadi salah satu tujuan penting evaluasi tersebut. Dengan demikian, penyelenggara pelayanan publik diharapkan tidak berhenti pada pemenuhan persyaratan administratif, tetapi terus membenahi kualitas layanan agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara langsung.

“Penilaian ini bukan semata-mata untuk memberikan nilai, tetapi menjadi instrumen pencegahan maladministrasi dan mendorong perbaikan

kualitas pelayanan publik yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” katanya.

Secara historis, pengawasan pelayanan publik di Indonesia diperkuat melalui pembentukan Ombudsman Republik Indonesia pada 2000 yang kemudian memiliki landasan hukum melalui Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Secara internasional, lembaga ombudsman memiliki sejarah lebih panjang, dengan institusi Ombudsman Swedia yang dibentuk pada 1809 dan menjadi salah satu model awal pengawasan terhadap administrasi pemerintahan.

Keikutsertaan Buton dalam penilaian 2026 menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola pelayanan publik di daerah. Melalui evaluasi yang berlangsung hingga November tersebut, pemerintah daerah diharapkan dapat mengidentifikasi kekurangan, mencegah potensi maladministrasi, dan meningkatkan kepatuhan terhadap standar pelayanan demi kualitas layanan yang semakin baik bagi masyarakat. (*)

Sekolah Rakyat Buton Tengah Jadi Ikhtiar Bupati Buton Tengah Azhari Putus Rantai Kemiskinan



BUTON TENGAH, BP- Program Sekolah Rakyat di Kabupaten Buton Tengah diproyeksikan tidak hanya menjadi fasilitas pendidikan bagi keluarga prasejahtera, tetapi juga instrumen untuk memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi. Bupati Buton Tengah Dr. Azhari menyebutkan program tersebut sebagai bentuk amal jariyah sekaligus terobosan dalam menghadirkan keadilan pendidikan bagi seluruh anak.

Pernyataan itu disampaikan Azhari saat membuka Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Tahun Ajaran 2026/2027 di Kompleks Sekolah Rakyat Permanen, Desa Balobone, Kecamatan Mawasangka, Senin (3/8/2026). Kegiatan tersebut sekaligus dirangkaikan dengan Open House satu tahun berdirinya Sekolah Rakyat dan peringatan Hari Anak Nasional.

Menurut Azhari, persoalan ekonomi tidak semestinya menentukan masa depan seorang anak. Ia menilai sebagian anak berisiko putus sekolah bukan karena rendahnya kemampuan intelektual, melainkan karena keluarga tidak memiliki kemampuan membiayai kebutuhan pendidikan. “Kemiskinan tidak boleh menjadi penghalang bagi seorang anak untuk bermimpi dan berprestasi setinggi langit,” kata Azhari.

Melalui pola pendidikan berasrama tanpa biaya, Sekolah Rakyat memberikan dukungan yang mencakup tempat tinggal, pemenuhan gizi, pendidikan, dan pendampingan. Azhari mengatakan model tersebut memberikan kesempatan kepada anak-anak dari keluarga prasejahtera untuk memperoleh layanan pendidikan berkualitas yang sebelumnya lebih sulit dijangkau oleh kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.

Gagasan tersebut sejalan dengan arah awal Program Sekolah Rakyat secara nasional. Pemerintah mulai mematangkan program itu pada awal 2025 untuk memberikan pendidikan gratis dan berkualitas kepada anak-anak dari keluarga miskin, termasuk kelompok miskin ekstrem. Kementerian

Sosial saat itu menargetkan Sekolah Rakyat mulai beroperasi pada tahun ajaran 2025/2026.

Secara regulasi, Sekolah Rakyat kemudian ditempatkan sebagai satuan pendidikan formal berbasis asrama dan pendidikan karakter bagi peserta didik dari keluarga miskin ekstrem, miskin, dan/atau rentan. Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Rakyat mulai berlaku pada 17 Juli 2025.

Dalam konteks yang lebih luas, gagasan pemerataan pendidikan juga memiliki pijakan dalam sejarah pemenuhan hak anak di tingkat internasional. Pada 1989, negara-negara dunia mengadopsi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Anak yang menegaskan kerangka perlindungan dan pemenuhan hak anak, termasuk hak untuk tumbuh dan berkembang. Komitmen tersebut kemudian menjadi salah satu landasan global dalam mendorong akses pendidikan yang lebih setara.

Azhari menegaskan keberhasilan Sekolah Rakyat tidak dapat dibebankan kepada sekolah semata. Sinergi pemerintah daerah, pemerintah pusat, tenaga pendidik, orang tua, dan berbagai unsur masyarakat diperlukan agar program tersebut mampu membentuk anak yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki karakter dan ketangguhan. “Sekolah Rakyat bukan sekadar bangunan fisik, melainkan simbol harapan baru bagi anak-anak pesisir dan pedalaman,” ujarnya.

Pembukaan MPLS tersebut dihadiri Wakil Bupati Buton Tengah Muh. Adam Basan, Wakil Ketua DPRD Buton Tengah Mazaluddin, Tim Inspektorat Kementerian Sosial RI, perwakilan Kapolda Sultra bersama taruna Akpol dan taruna Akmil, perwakilan Kapolres Buton Tengah, Ketua TP-PPK Umi Noranah Azhari, sejumlah kepala OPD, Kepala Kantor Kementerian Agama, Camat Mawasangka, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi, dewan guru dan tenaga kependidikan, serta para orang tua atau wali dan siswa. Bagi Azhari, keberadaan sekolah tersebut menjadi bagian dari investasi sumber daya manusia agar keterbatasan ekonomi tidak lagi menentukan batas cita-cita anak. (ardi)

BUMDes Mataleo Kelola 1.000 Ayam Petelur untuk Dongkrak Ekonomi Desa

Laporan: Kasrun

BUTON UTARA, BP- Pemerintah Kabupaten Buton Utara (Butur), Sulawesi Tenggara, memperkuat ketahanan pangan berbasis potensi lokal dengan mendorong usaha peternakan dikelola secara produktif oleh desa. Sebanyak 1.000 ekor bibit ayam petelur dilepas untuk dikembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mataleo di kandang produksi Desa Waode Buri, Kecamatan Kulisusu Utara, Kamis (6/8/2026).

Wakil Bupati Buton Utara Rahman, SKM., M.Kes., yang melepas bibit tersebut mengatakan pengembangan peternakan tidak sekadar diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pangan, tetapi juga menjadi instrumen meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Usaha itu diharap-



kan membuka lapangan kerja sekaligus menambah pendapatan asli desa melalui pengelolaan BUMDes yang berkelanjutan.

“Program yang berkaitan dengan kemandirian desa, terutama dalam rangka menjaga ketahanan pangan, patut diapresiasi dan diberi dukungan,” kata Rahman.

Menurut Rahman, keberlanjutan usaha akan sangat ditentukan oleh kesungguhan dan kerja sama seluruh pi-

hak. Pemerintah desa, pengurus BUMDes, dan masyarakat harus membangun sinergi agar peternakan ayam petelur tersebut tidak berhenti sebagai program bantuan, tetapi berkembang menjadi kegiatan ekonomi produktif.

Langkah Butur tersebut sejalan dengan perkembangan sektor perunggasan dunia. FAO mencatat produksi telur global meningkat dari sekitar 15 juta ton pada 1961

menjadi 94 juta ton pada 2022. FAO juga menyebut unggas berperan penting dalam ketahanan pangan dan menjadi sumber protein serta pendapatan bagi rumah tangga pedesaan.

Di Indonesia, pengembangan usaha perunggasan di tingkat desa juga memiliki jejak panjang. Kajian Kementerian Pertanian mencatat produksi telur nasional dari berbagai jenis unggas terus meningkat pada

periode 1969-1994, antara lain didorong perkembangan industri unggas komersial dan program intensifikasi peternakan di pedesaan.

Rahman berharap Desa Waode Buri dapat menjadi contoh bagi desa lain di Buton Utara dalam mengolah potensi lokal menjadi sumber pendapatan. “Semoga desa yang memiliki produk usaha melalui BUMDes akan menjadi role model bagi desa-desa yang belum mengoptimalkan kekayaan sumber daya yang ada,” ujarnya.

Ia menilai Buton Utara memiliki sumber daya lahan yang cukup

untuk dikembangkan, baik bagi sektor pertanian maupun peternakan. Karena itu, usaha ayam petelur di Waode Buri diharapkan mampu menjadi penggerak ekonomi kerakyatan sekaligus memperkuat kemandirian pangan masyarakat.

Pelepasan 1.000 bibit ayam petelur tersebut turut dihadiri Kepala Dinas PUPR Butur, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Butur, Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan, Tripika Kecamatan Kulisusu Utara, para kepala desa se-Kecamatan Kulisusu Utara, pendamping desa, serta tokoh masyarakat setempat. (*)

Investigasi Kemenkes Tak Temukan Pelanggaran dalam Kasus dr. Siti Zahra



Peliput: Andina L

JAKARTA, BP- Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tidak menemukan pelanggaran tata kelola Program Internsip Dokter Indonesia (PIDI) dalam kasus meninggalnya dr. Siti Zahra Maghfira (SZM), peserta internship yang bertugas di Rumah Sakit Sentra Medika Cisalak, Depok. Hasil investigasi justru menemukan adanya kondisi kesehatan yang membutuhkan perhatian khusus, termasuk penyakit penyerta yang berkaitan dengan kesehatan mental.

Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan Kemenkes, dr. Yuli Farianti, mengatakan kondisi kesehatan tersebut menjadi salah satu temuan penting dalam pemeriksaan. Namun, Kemenkes tidak membuka diagnosis maupun rincian kondisi medis dr. SZM kepada publik karena terikat prinsip kerahasiaan medis dan etika profesi. Di sisi lain, hasil pemeriksaan terhadap tata kelola internship tidak menemukan penyimpangan.

Investigasi dilakukan tim gabungan yang terdiri atas Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal SDM Kese-

hatan, Konsil Kesehatan Indonesia (KKI), Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Kolegium Psikiatri, dan Kepolisian. Tim menelusuri dokumen, melakukan wawancara dan klarifikasi kepada berbagai pihak, serta memeriksa sistem penyelenggaraan internship di Rumah Sakit Sentra Medika Cisalak.

Inspektur Investigasi Kemenkes Hendra Teja mengatakan pemeriksaan mencakup lima aspek, yakni jam kerja, beban kerja, pemberian izin sakit dan cuti, lingkungan kerja, serta kondisi kesehatan peserta. Dari pemeriksaan tersebut, tidak ditemukan kelebihan jam kerja. Selama menjalani internship, dr. SZM bekerja sesuai ketentuan maksimal 40 jam per minggu dan memperoleh hak istirahat, termasuk libur setelah menjalani jadwal jaga.

“Hasil pemeriksaan kami menunjukkan tidak terdapat penyimpangan pada aspek jam kerja, beban kerja, pemberian izin sakit dan cuti, maupun lingkungan kerja selama dr. SZM menjalankan Program Internship,” kata Hendra.

Tim juga tidak menemukan penugasan di luar kewenangan

peserta ataupun beban kerja berlebihan. Ketika mengalami kondisi kesehatan yang membutuhkan istirahat, dr. SZM diberikan izin untuk tidak bertugas tanpa kewajiban mengganti hari secara langsung. Pemeriksaan terhadap manajemen rumah sakit, dokter pendamping, rekan sejawat, dokumen, dan komunikasi juga tidak menemukan indikasi perundungan atau tekanan selama pelaksanaan internship.

Kemenkes mencatat kasus dr. SZM merupakan satu dari enam kasus meninggalnya peserta PIDI yang berkaitan dengan kondisi kesehatan atau penyakit. Dari enam kasus tersebut, lima telah selesai diinvestigasi dan seluruhnya dinyatakan tidak menemukan pelanggaran tata kelola program dalam aspek jam kerja, beban kerja, lingkungan kerja, maupun mekanisme pemberian izin.

Secara historis, PIDI bukan program baru. Pemerintah mulai menjalankan program tersebut di Sumatera Barat pada Maret 2010 setelah soft launching di Padang pada 22 Februari 2010. Program ini kemudian menjadi

bagian dari sistem pemantapan kompetensi dokter sebelum memasuki praktik secara lebih mandiri. Pada 2017, Kemenkes mencatat 43.319 dokter telah mengikuti program internship dari 75 fakultas kedokteran, dengan penempatan di 1.530 wahana yang terdiri atas 753 rumah sakit dan 777 puskesmas.

Evaluasi terhadap program tersebut kini diarahkan tidak hanya pada kepatuhan jam dan beban kerja, tetapi juga perlindungan kesehatan peserta. Kemenkes menyatakan akan memperkuat skrining kesehatan fisik dan jiwa, peran dokter pendamping, serta komunikasi antara peserta, wahana, pemerintah pusat. Langkah itu relevan dengan perhatian global terhadap kesehatan tenaga medis. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mencatat sedikitnya seperempat tenaga kesehatan dan perawatan di dunia melaporkan gejala kecemasan, depresi, atau burnout selama periode Januari 2020-April 2022. Program internship yang kini diikuti sekitar 12 ribu dokter setiap tahun di Indonesia diharapkan terus diperbaiki agar keselamatan, kesehatan, dan hak peserta semakin terlindungi.(*)

CKG Tembus 73,8 Juta Peserta, Kemenkes Perkuat Penanganan PTM



Peliput: Lisna

JAKARTA, BP- Kementerian Kesehatan mempercepat tindak lanjut hasil Cek Kesehatan Gratis (CKG) setelah program tersebut menjangkau 73,8 juta penduduk hingga 31 Juli 2026. Pemerintah kini mengarahkan program bukan sekadar menemukan faktor risiko penyakit, melainkan memastikan masyarakat yang terdeteksi berisiko memperoleh edukasi, pengobatan, pemantauan, dan rujukan.

Dari total peserta tersebut, 62,7 juta orang menjalani skrining melalui puskesmas dan kegiatan komunitas, sedangkan 11,1 juta lainnya merupakan anak sekolah. Layanan CKG tersebut gratis bagi seluruh kelompok umur melalui lebih dari 10.000 puskesmas, sekolah, dan komunitas. Jumlah peserta itu juga telah melampaui capaian sepanjang 2025 yang mencapai sekitar 70 juta orang.

Fokus tindak lanjut pada 2026 diarahkan pada tiga faktor risiko penyakit tidak menular (PTM), yakni hipertensi, kadar gula darah tinggi, dan kolesterol tinggi. Ketiganya merupakan faktor penting yang berkaitan dengan penyakit jantung, stroke, dan gagal ginjal. Hingga akhir Juli, pemeriksaan tekanan darah dan indeks massa tubuh telah mencapai 90 persen sasaran, sementara pemerik-

saan gula darah mencapai 83 persen.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan perluasan akses pemeriksaan harus diikuti kemampuan sistem kesehatan menangani persoalan yang ditemukan. “Tujuan CKG bukan hanya mengecek, tetapi membuat masyarakat sehat. Setelah akses diperluas, fokus kita adalah memastikan masalah yang ditemukan langsung ditangani,” ujar Budi dalam Media Briefing Evaluasi CKG di Gedung Adhyatma Kemenkes, Jakarta Selatan, Selasa (4/8).

Untuk memperkuat penanganan, Kemenkes mulai Agustus 2026 memantau data tata laksana hasil skrining dari sedikitnya 5.300 puskesmas sebelum diperluas secara nasional. Pada tahap awal di komunitas, obat hipertensi, diabetes, dan kolesterol dapat diberikan secara gratis hingga 15 hari pertama sesuai indikasi medis, sebelum pengobatan dilanjutkan melalui mekanisme Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Kebijakan tersebut merespons perubahan pola penyakit di Indonesia. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono mengatakan penyakit tidak menular kini semakin dominan dan sering berkembang tanpa gejala. “Orang dengan hipertensi sering tidak mengetahui dirinya hipertensi. Orang dengan diabetes juga sering tidak mengetahui dirinya diabetes. Karena itu, kita tidak bisa hanya

mengandalkan keluhan,” kata Dante.

Secara historis, pendekatan ini sejalan dengan perubahan beban penyakit dunia. Organisasi Kesehatan Dunia sejak beberapa dekade terakhir menempatkan penyakit kardiovaskular, kanker, diabetes, dan penyakit pernapasan kronis sebagai kelompok utama penyakit tidak menular yang menjadi tantangan kesehatan global. Indonesia pun mengalami transisi epidemiologi, dari persoalan penyakit infeksi menuju beban ganda yang semakin besar akibat PTM.

Pakar Kesehatan Masyarakat dr. Iwan Ariawan menilai pemeriksaan kesehatan perlu dilakukan secara berkelanjutan agar masyarakat tidak hanya berumur panjang, tetapi juga memiliki masa hidup sehat yang lebih panjang. “Yang ingin kita capai bukan hanya masyarakat hidup lebih lama, tetapi hidup sehat dan berkualitas. Karena itu, CKG harus berjalan dalam satu rangkaian: skrining, deteksi, dan tindak lanjut,” ujarnya.

Kemenkes menargetkan CKG menjangkau 130 juta penduduk pada 2026. Pemerintah juga mendorong pemeriksaan kesehatan dilakukan secara rutin, idealnya setiap tahun, disertai pola makan seimbang dan aktivitas fisik yang cukup agar faktor risiko dapat ditemukan sebelum berkembang menjadi penyakit atau komplikasi serius.(*)

PT FAREN GRAFIKA KRITIK, LUGAS, DAN INDEPENDEN Wartawan Baubau Post tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun dalam melakukan tugas jurnalistik Dalam Pelaksanaan Tugas, Wartawan Baubau Post dibekali tanda pengenal. Untuk itu, masyarakat yang mencurigai seseorang yang mengatasnamakan Baubau Post, segera menghubungi Kantor Redaksi Surat Kabar Baubau Post Segala berita yang diterbitkan oleh Baubau Post meruoakan tanggung jawab penanggungjawab redaksi	Pemimpin Umum: Fauzan NWA Penanggungjawab/Pemimpin Redaksi: Ardi Redpel: Prasetyo Korlip: Firman Redaktur: Kasrun, Rahim Reporter: Mashuri, Lisna, Asis, Hafid, Amat Jr, Noval, La Harman Layouter: Ririn Pracetak: Aditya Cetak Jamaludin Penerbit: PT FAREN GRAFIKA Komisaris: Erna Agule Direktur Utama: Andina Latief Manager Keuangan: Nabila DAA Manager Iklan & Pemasaran: Jamaluddin Kepala Sirkulasi: Robi Administrasi: Salvana Kepala Biro Wakatobi: Risman Kepala Biro Buton Utara: Kasrun Kepala Biro Buton: La Harman Kepala Biro Buton Selatan: Firman Kepala Biro Buton Tengah: Komarudin Kepala Biro Sultra: Masuri Agen Baubau: Jamaluddin Agen Buton Selatan: Firman Agen Buton: Samrihan Agen Buton Utara: Kasrun Harga dan Langganan: Dalam Kota Baubau 100.000/bulan, Luar Kota Baubau + Ongkos Kirim Eceran dalam Kota Baubau Rp 5000/eks	Alamat Redaksi/Tata usaha: Jalan Raya Palagimata (BTN Lipu Morikana) Blok K Nomor 01 Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara Tlp 0402-2014287- Email: baubaupost2019@gmail.com, ardiandina7786@gmail.com Percetakan: PT Faren Grafika, Alamat: Jalan Raya Palagimata (BTN Lipu Morikana) Blok K Nomor 01 Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara
---	--	--

Senin Diperiksa, Bigmo Terseret Dugaan Libatkan Anak Promosi Liquid Vape



Ilustrasi anak yang terhubung dengan media sosial

Laporan: Amran

JAKARTA, BP - Polda Metro Jaya akan memeriksa YouTuber Muhammad Jannah alias Bigmo pada Senin (10/8) untuk mendalami dugaan pelibatan anak di bawah umur dalam promosi liquid vape melalui tayangan live streaming. Pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari penyelidikan Direktorat Reserse PPA dan PPO setelah kasus itu dilaporkan kepada kepolisian.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengatakan penyidik telah melakukan serangkaian klarifikasi sebelum memanggil Bigmo. Polisi antara lain meminta keterangan dari orang tua dan empat anak yang muncul dalam video dengan pendampingan keluarga, serta mengumpulkan materi siaran langsung yang dilaporkan.

“Pihak terlapor ataupun pihak yang dilaporkan dijadwalkan menjalani klarifikasi pada Senin 10 Agustus,” kata Budi kepada wartawan, Jumat (7/8).

Selain Bigmo, penyidik sebelumnya memeriksa saksi berinisial F yang disebut melihat sekaligus menyimpan materi video terkait perkara tersebut. Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti, mulai dari materi live streaming, hasil rekaman, cuplikan video hingga dokumen pendukung lainnya. Penyidik bahkan mendatangi PT TLI untuk mendalami hubungan kerja dengan pihak yang dilaporkan.

Kasus ini mencuat setelah Bigmo diadukan ke Direktorat PPA-PPO Polda Metro Jaya karena diduga mengajak sejumlah anak di bawah umur mempromosikan liquid vape dalam siaran langsung. Dugaan tersebut kemudian mendapat perhatian pemerintah karena menyangkut perlindungan anak di ruang digital dan promosi produk yang bukan diperuntukkan bagi kelompok usia tersebut.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menilai pelibatan anak untuk mempromosikan

produk vape merupakan persoalan serius. “Anak-anak harus dilindungi dari segala bentuk eksploitasi di ruang digital,” kata Meutya dalam keterangannya, Minggu (2/8).

Perhatian terhadap promosi vape kepada anak bukan persoalan baru dalam agenda kesehatan global. WHO sejak beberapa tahun terakhir memperingatkan bahwa perusahaan dan pemasar produk nikotin menggunakan media sosial, desain produk, serta beragam rasa untuk menarik kelompok muda. Pada 2024, WHO menyebut sedikitnya 16.000 varian rasa digunakan dalam produk rokok elektronik dan memperingatkan bahwa anak serta remaja menjadi sasaran pemasaran melalui media sosial dan influencer.

Di Indonesia, perlindungan masyarakat dari produk tembakau dan zat adiktif juga telah memiliki sejarah regulasi. PP Nomor 109 Tahun 2012 menjadi salah satu dasar pengamanan produk tembakau bagi kesehatan sebelum kemudian

dicabut dan digantikan PP Nomor 28 Tahun 2024 sebagai aturan pelaksanaan UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Pada 2026, Kementerian Kesehatan juga menyiapkan aturan mengenai peringatan kesehatan dan informasi pada produk tembakau serta rokok elektronik, termasuk standardisasi kemasan untuk mengurangi daya tarik produk bagi anak dan remaja.

Secara global, kekhawatiran terhadap paparan nikotin pada anak semakin kuat. WHO pada 2026 menyebut sekitar 40 juta anak usia 13-15 tahun di dunia menggunakan produk tembakau, sementara penggunaan rokok elektronik di kelompok muda terus meningkat. Di Indonesia, WHO mencatat 12 persen pelajar usia 13-17 tahun menggunakan rokok elektronik berdasarkan Global School Health Survey 2023.

Sementara itu, Bigmo telah menyampaikan permintaan maaf melalui video yang diunggah di akun YouTube Niceguymo. Ia mengakui tindakannya telah menimbulkan kegaduhan dan menyatakan perbuatannya merupakan kesalahan yang tidak dapat dibenarkan. Pemeriksaan pada Senin mendatang akan menjadi bagian dari proses polisi untuk mengklarifikasi dugaan pelibatan anak dan menelusuri rangkaian peristiwa berdasarkan keterangan para pihak serta barang bukti yang telah dikumpulkan. (*)

Senpi di Sekolah Jaksel Tercatat Milik Direktur Perusahaan Airsoft



Ilustrasi. Polisi mengungkap sosok berinisial DS, pemilik senjata api di sekolah swasta di Jakarta Selatan, merupakan seorang direktur perusahaan impor airsoft gun

Laporan: Hadi

JAKARTA, BP- Polisi masih menelusuri asal-usul satu pucuk senjata api jenis Franchi SPAS-15 kaliber 12 gauge yang ditemukan di sebuah yayasan sekolah swasta di Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Senjata tersebut tercatat atas nama DS, yang berdasarkan penelusuran kepolisian telah meninggal dunia pada 2020.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengatakan DS diketahui pernah menjabat sebagai direktur PT Lokta Karya Perbakin (LKP). Perusahaan itu bergerak di bidang impor senjata angin dan senjata airsoft gun. “Jadi kalau dilihat penelusuran dari identitas ini yang bersangkutan merupakan direktur ya, terhadap suatu perusahaan PT LKP,” kata Budi kepada wartawan, Jumat (7/8).

Informasi mengenai DS diperoleh setelah Subdit Pengawasan Senjata Api dan Bahan Peledak (Wasendak) Ditintelkam Polda Metro Jaya melakukan penelusuran terhadap status kepemilikan senjata tersebut. Polisi kemudian mengamankannya untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut karena pemilik yang tercatat secara legal sudah tidak hidup. “Dari hasil pendalaman Direktorat Intelkam Subdit Wasendak, menemukan bahwa saudara DS sudah meninggal dunia tahun 2020,” ujar Budi.

Penemuan senpi tersebut juga berkaitan dengan temuan 995 senjata jenis airsoft gun di yayasan yang sama. PT Lokta Karya Perbakin sebelumnya mengakui ratusan senjata tersebut merupakan milik perusahaan dan menyatakan seluruhnya legal serta memiliki izin. Namun, keberadaan senjata api Franchi SPAS-15 masih menjadi bagian yang didalamai polisi.

Budi mengatakan penyidik belum menyimpulkan bagaimana senjata api yang tercatat atas nama DS

tersebut dapat berada di lingkungan yayasan sekolah. Polisi melalui Subdit Wasendak masih memeriksa aspek regulasi sekaligus rantai penguasaan senjata setelah pemiliknya meninggal. “Masih didalami oleh Wasendak terkait tentang regulasi, regulasi pasti sudah ada, tetapi terkait tentang kenapa berada di pengawasan yang bersangkutan,” katanya.

Secara historis, penguasaan senjata api di Indonesia telah lama berada dalam kerangka pengaturan ketat. Salah satu landasan hukum yang berusia lebih dari tujuh dekade adalah Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang ditetapkan pada 1 September 1951 dan diundangkan pada 4 September 1951. Regulasi tersebut antara lain menjadi bagian penting dalam rezim hukum Indonesia mengenai senjata api dan bahan peledak, meski sebagian ketentuannya kini telah mengalami perubahan.

Persoalan pengawasan senjata juga menjadi perhatian internasional. Pada 2001, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi Programme of Action untuk mencegah, memberantas, dan menghapus perdagangan ilegal senjata kecil dan senjata ringan. Program tersebut mendorong negara-negara memperkuat pencatatan, penandaan, pengawasan perpindahan, serta kemampuan melacak senjata ilegal.

Dalam kasus di Jakarta Selatan, Budi menegaskan pemilik senjata yang meninggal seharusnya diikuti dengan laporan kepada kepolisian oleh pihak keluarga. Dokumen dan senjata dapat diserahkan atau ditiptikan untuk menentukan status kepemilikan berikutnya sesuai ketentuan. “Harusnya, dokumen apabila meninggal, keluarga melaporkan kepada pihak kepolisian, menyerahkan dokumen, menyerahkan dan bisa menitipkan,” tutur Budi. Polisi kini masih mendalami bagaimana prosedur tersebut berjalan serta alasan senjata itu berada di yayasan sekolah. (*)

Polda Jabar Amankan 1.600 Lebih Pelaku Narkoba dan Kejahatan Jalanan

BANDUNG, BP- Polda Jawa Barat mengamankan lebih dari 1.600 pelaku tindak pidana narkoba, obat-obatan keras tertentu, dan kejahatan jalanan sepanjang 2026 hingga pertengahan Juli. Dari jumlah tersebut, 1.245 orang merupakan pelaku peredaran narkoba dan obat keras tertentu, sedangkan lebih dari 400 lainnya terlibat kejahatan jalanan.

Kapolda Jabar Irjen Pol Pipit Rismanto mengatakan penindakan tersebut merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk menekan premanisme, begal, pencurian kendaraan bermotor, serta peredaran narkoba. Ia menegaskan kepolisian akan mempertahankan patroli intensif, terutama di wilayah yang dinilai rawan kejahatan.

“Dalam menanggulangi kejahatan jalanan seperti premanisme, begal, dan curanmor, sesuai arahan Bapak Gubernur dalam rapat koordinasi, kita sudah melakukan pa-

troli dialogis secara intensif dan ini harus berjalan terus. Sebelum dipencet belnya untuk berhenti, tidak ada kata berhenti,” ujar Pipit saat ekspose pengungkapan kejahatan jalanan di Polda Jabar, Jumat (7/8).

Dari pengungkapan kasus narkoba, polisi menyita sekitar 2,7 juta obat-obatan keras, 822 butir psikotropika, 618 gram gorila sintetis, 612 butir Inex, lebih dari 2 kilogram daun ganja, serta lebih dari 1,5 kilogram sabu-sabu. Sementara dalam perkara kejahatan jalanan, barang bukti yang diamankan meliputi lebih dari 1.000 sepeda motor, belasan mobil, ratusan senjata tajam, dan tiga senjata api.

Untuk mengantisipasi kejahatan pada waktu dan lokasi rawan, Polda Jabar juga menyiapkan tim unit reaksi cepat. Tim tersebut akan melakukan patroli di sejumlah titik yang membutuhkan kehadiran aparat, termasuk

pusat kegiatan masyarakat. Polisi juga menyiapkan pelayanan pengawalan pulang malam secara gratis bagi masyarakat.

Pipit menilai pengamanan tidak dapat hanya mengandalkan aparat. Karena itu, ia mendorong penguatan kembali sistem keamanan lingkungan atau siskamling. Perhatian keluarga juga dinilai penting karena sejumlah pelaku peredaran narkoba dan kejahatan jalanan didominasi usia pelajar. Polda Jabar berencana meluncurkan program “Orang Tua atau Wali Memanggil” bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam waktu dekat.

“Setiap malam orang tua ikut bertanggung jawab mengendalikan dan menunjukkan kepedulian terhadap

anak-anak remajanya untuk kembali ke rumah, belajar, dan tidak nongkrong sampai pagi karena besok harus sekolah,” kata Pipit.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengapresiasi langkah Polda Jabar dan menilai pemberantasan narkoba serta kejahatan jalanan harus menjadi tanggung jawab bersama. Menurut dia, polisi, TNI, Satpol PP, Dinas Perhubungan, pemerintah daerah, dan masyarakat perlu bergerak dalam satu strategi untuk menciptakan ruang publik yang aman.

“Kejahatan ini harus diperangi secara bersama. Jajaran polisi saja tidak cukup, TNI saja tidak cukup, Satpol PP tidak cukup, Dishub tidak cukup, harus semua masyarakat memiliki nyali yang sama bahwa kejahatan ini harus

diberantas,” ujar Dedi.

Penanganan narkoba di Indonesia sendiri memiliki sejarah panjang. Upaya kelembagaan telah dimulai sejak 1971 melalui Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1971 yang antara lain menugaskan penanggulangan penyalahgunaan narkoba kepada Bakolak Inpres. Pemerintah kemudian membentuk Badan Koordinasi Narkotika Nasional pada 1999 dan BNN pada 2002, sebelum kedudukannya diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Secara global, persoalan narkoba juga terus berkembang, termasuk munculnya zat psikoaktif baru. UNODC mencatat 101 zat psikoaktif baru dilaporkan untuk pertama kali pada 2024 oleh 45 negara, menunjukkan tantangan peredaran narkoba terus berubah lintas negara. (*)

Pemkot Baubau Perkuat Infrastruktur, Bappenas Soroti Potensi Maritim dan Logistik



Laporan: Prasetyo M

BAUBAU, BP- Pemerintah Kota Baubau memperkuat agenda pembangunan infrastruktur perkotaan dengan pemerintah pusat setelah Kota Baubau memperoleh alokasi anggaran yang cukup besar untuk perbaikan infrastruktur jalan pada Tahun Anggaran 2027. Dukungan tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Penguatan Infrastruktur Perkotaan bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas di Baubau, Kamis (6/8/2026).

Rakor yang berlangsung di aula lantai II Kantor Wali Kota Baubau itu dipimpin Wakil Wali Kota Baubau Ir. Wa Ode Hamsinah Bolu, M.Sc., didampingi Sekretaris Daerah Kota Baubau La Ode Darus Salam, S.Sos., M.Si. Pertemuan tersebut dihadiri Koordinator Transportasi Jalan dan Transportasi Multimedia Kementerian PPN/Bappenas Ahmad Zainuddin, S.Sos., MA., untuk memetakan potensi strategis Baubau sebagai salah satu pusat pertumbuhan kawasan Kepulauan Buton.

Wawali mengatakan dukungan in-

frastruktur diperlukan agar potensi daerah tidak berhenti sebagai keunggulan komparatif, tetapi berkembang menjadi penggerak ekonomi. "Bappenas mencoba memetakan potensi-potensi yang kita miliki di Kota Baubau. Potensi yang sudah terlihat ini dapat terus kita dorong sehingga menjadi tulang punggung pembangunan Kota Baubau ke depan," kata Hamsinah.

Salah satu agenda yang didorong Pemkot Baubau ialah pengembangan konektivitas udara melalui perluasan dan perpanjangan landasan Bandara Betoambari. Pemerintah daerah berharap fasilitas tersebut nantinya mampu melayani pesawat berbadan besar sehingga kapasitas penumpang dan angkutan kargo meningkat. Dampaknya diharapkan dapat menekan biaya logistik dan memperkuat konektivitas kawasan.

Baubau juga mengembangkan peran sebagai kota maritim melalui optimalisasi pelabuhan laut. Pemkot telah melaksanakan ekspor perdana dan menargetkan peningkatan frekuensi ekspor dengan komoditas yang lebih beragam.

Posisi tersebut dinilai strategis karena perdagangan antar-daerah dan konektivitas laut sejak lama menjadi bagian penting dalam perkembangan ekonomi kawasan kepulauan.

Sektor perikanan menjadi potensi lain yang mendapat perhatian, terutama melalui pengembangan konsep ekonomi biru bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan. Selain itu, pemerintah daerah mendorong hilirisasi rumput laut agar produksi tidak sekadar dipasarkan sebagai bahan mentah. Baubau juga diarahkan menjadi pusat penampungan hasil rumput laut dari daerah sekitar sehingga rantai nilai komoditas dapat berkembang di tingkat lokal.

Penguatan sektor unggulan tersebut sekaligus diarahkan untuk membuka ruang investasi. Pemkot Baubau telah menyiapkan profil investasi yang ditawarkan kepada calon investor, mencakup berbagai sektor potensial. Selain perikanan dan kelautan, pembahasan pembangunan juga mencakup kesehatan, pendidikan, pertanian, dan perhubungan.

Secara historis, pembangunan konekti-

vititas merupakan salah satu faktor penting dalam perkembangan wilayah kepulauan, baik di Indonesia maupun dunia. Pengembangan pelabuhan, bandara, dan jaringan jalan menjadi instrumen untuk mengurangi biaya distribusi serta memperluas akses pasar. Dalam konteks Indonesia sebagai negara kepulauan, penguatan konektivitas juga menjadi bagian dari agenda pembangunan nasional sejak era pembangunan infrastruktur besar-besaran pada dekade terakhir.

Hamsinah mengatakan pertemuan dengan Bappenas juga menjadi ruang bagi pemerintah daerah menyampaikan kebutuhan pembangunan Baubau kepada pemerintah pusat. "Dari komunikasi ini, Kota Baubau memperoleh alokasi anggaran yang cukup besar pada Tahun Anggaran 2027, khususnya untuk mendukung program perbaikan infrastruktur jalan," ujarnya. Pemkot berharap dukungan tersebut memperkuat konektivitas sekaligus mempercepat Baubau menjadi pusat pertumbuhan ekonomi kawasan Kepulauan Buton.(*)

Hari Pramuka Baubau Diundur 18 Agustus 2026 , Menyesuaikan Agenda Nasional di Cibubur

Laporan: Prasetyo M

BAUBAU, BP- Pemerintah Kota Baubau menggeser pelaksanaan peringatan Hari Pramuka 2026 dari 14 menjadi 18 Agustus. Perubahan jadwal tersebut dilakukan untuk menyesuaikan agenda nasional yang akan diikuti para Ketua Kwar-

tir Cabang (Kwarcab) dari seluruh Indonesia, termasuk kegiatan di Jakarta dan pembukaan Jambore Nasional di Cibubur.

Penyesuaian itu diputuskan dalam rapat pemantapan panitia rangkaian HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Baubau. Selain jadwal Hari Pramuka, rapat juga membahas kesia-pan perkemahan serta teknis Pawai Obor atau Malam Taptu yang menjadi bagian dari rangkaian peringatan kemerdekaan.

Asisten I Setda Kota Baubau, La Ode Aswad, S.Sos., M.Si., mengatakan perubahan jadwal diperlukan agar agenda peringatan Hari Pramuka di daerah tidak bertepatan dengan kegiatan nasional. Para Ketua Kwarcab dijadwalkan menghadiri agenda nasional di Jakarta sekaligus pembukaan Jambore Nasional di Cibubur.

"Penyesuaian ini dilakukan agar pelaksanaan Hari Pramuka di daerah tidak berbenturan dengan agenda nasional yang diikuti



Asisten I Setda Kota Baubau, La Ode Aswad, S.Sos., M.Si

para Ketua Kwartir Cabang," kata La Ode Aswad saat ditemui awak media, Rabu (5/8).

Menurut Aswad, perubahan tanggal tersebut turut berpengaruh terhadap kegiatan perkemahan. Panitia akan menyesuaikan pelaksanaannya dengan jadwal baru, sedangkan rincian teknis kegiatan masih dalam tahap pembahasan dan koordinasi.

Rapat pemantapan juga memastikan rute Pawai Obor atau Malam Taptu. Prosesi tetap dimulai dari belakang Rumah Jabatan Wali Kota Baubau, tepatnya di depan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), kemudian menuju Kilometer 1, melewati Lapangan Tembak, Jalan Bataraguru, kawasan Toko Maruf Lama, dan berakhir di Simpang Masjid, Jalan Kartini. Sejumlah titik lintasan masih dimatangkan panitia.

Aspek keselamatan menjadi perhatian lain dalam kegiatan tersebut. Pemerin-

tah mengingatkan peserta agar menggunakan obor secara bertanggung jawab karena kegiatan berlangsung pada musim kemarau yang meningkatkan risiko kebakaran. Koordinasi teknis diperlukan agar kegiatan berjalan tertib tanpa

mengabaikan keselamatan peserta maupun masyarakat di sepanjang rute.

Secara historis, Gerakan Pramuka Indonesia lahir melalui Keputusan Presiden Nomor 238 Tahun 1961 dan secara resmi diperkenalkan pada 14 Agustus 1961. Tanggal tersebut kemudian diperingati sebagai Hari Pramuka. Secara internasional, gerakan kepanduan telah berkembang sejak awal abad ke-20 setelah Robert Baden-Powell men-erbitkan Scouting for Boys pada 1908, yang menjadi salah satu tonggak perkembangan gerakan kepanduan modern di berbagai negara.

Pemkot Baubau berharap perubahan jadwal tersebut tidak mengurangi semangat peringatan Hari Pramuka dan HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Seluruh rangkaian kegiatan diharapkan berlangsung aman, tertib, dan meriah serta menjadi ruang untuk memperkuat persatuan, nasionalisme, dan kebersamaan masyarakat.(*)

DP3AKB Baubau Perkuat Kader IMP untuk Cetak Generasi Unggul dan Tangguh

Laporan: Andina

BAUBAU, BP- Pemerintah Kota Baubau memperkuat lini lapangan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dengan meningkatkan kapasitas Institusi Masyarakat Pedesaan/Kelurahan (IMP). Langkah tersebut diarahkan untuk membangun keluarga berkualitas sekaligus menyiapkan generasi yang sehat, cerdas, tangguh, dan berdaya saing.

Penguatan itu dilakukan melalui kegiatan Pembinaan IMP dan Program Bangga

Kencana Lini Lapangan Tahun 2026 yang digelar di Aula Kantor Camat Wolio, Selasa (4/8/2026). Kegiatan tersebut dibuka Kepala DP3AKB Kota Baubau Abdul Rahman, S.Pd., M.Si., dan diikuti unsur Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) serta kader IMP.

Abdul Rahman mengatakan, posisi kader di tingkat kelurahan menjadi strategis karena mereka merupakan mitra pemerintah yang berhadapan langsung dengan persoalan keluarga. Kader PPKBD, Sub-PPKBD, dan petugas lini lapangan diharapkan mampu

menerjemahkan kebijakan Bangga Kencana ke dalam pendampingan yang konkret bagi masyarakat.

"Jika kader IMP kuat, maka lini lapangan akan semakin kuat. Pelayanan kepada masyarakat akan jauh lebih berkualitas, sehingga Kota Baubau dapat melahirkan generasi yang sehat, cerdas, tangguh, dan berakhlak mulia," ujar Abdul Rahman.

Menurut dia, Bangga Kencana tidak lagi ditempatkan semata sebagai program pelayanan kontrasepsi. Pendekatannya kini mencakup siklus kehidupan keluarga, mulai dari edukasi dan

pendampingan kesehatan reproduksi pada masa pranikah dan kehamilan, pengasuhan anak serta pembinaan remaja, hingga pemberdayaan lansia agar tetap tangguh dan produktif.

Pendekatan tersebut menjadi semakin penting di tengah persoalan sosial yang dihadapi keluarga, antara lain perkembangan teknologi digital, pernikahan usia anak, stunting, dan tantangan pola pengasuhan. Karena itu, kader IMP dituntut memiliki kemampuan beradaptasi, berkoordinasi, dan membangun kolaborasi dengan berbagai pihak di tingkat mas-



yarakat.

Secara historis, pembangunan keluarga dan kependudukan telah menjadi bagian penting kebijakan pembangunan Indonesia sejak Program Keluarga Berencana dikembangkan secara nasional pada era 1970-an. Di tingkat global, agenda pembangunan keluarga dan kesehatan reproduksi juga mendapat perhatian melalui International Conference on Population and Development di Kairo pada 1994 yang menggeser pendekatan kependudukan menuju pem-

angunan manusia, kesehatan reproduksi, dan pemenuhan hak individu.

Abdul Rahman berharap pembinaan 2026 tidak berhenti pada penyampaian materi, tetapi menjadi ruang untuk bertukar pengalaman, memperkuat koordinasi, dan memastikan langkah antarkader sehingga pelayanan di lapangan semakin profesional dan inovatif. "Mari kita jadikan setiap kunjungan ke rumah warga bukan sekadar menjalankan program, tetapi menghadirkan

setiap penyuluhan bukan sekadar menyampaikan informasi, tetapi menyalakan semangat perubahan," katanya.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada panitia, narasumber, PKB, dan seluruh kader IMP yang selama ini terlibat dalam pelayanan masyarakat. Penguatan kapasitas mereka diharapkan memperkuat pelaksanaan Bangga Kencana dari tingkat pemerintah hingga keluarga sebagai basis pembangunan manusia di Kota Baubau.(*)